

# PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI BALI 2014

## OUTLINE ANALISIS PROVINSI

1. Perkembangan Indikator Utama
  - 1.1 Pertumbuhan Ekonomi
  - 1.2 Pengurangan Pengangguran
  - 1.3 Pengurangan Kemiskinan
2. Kinerja Pembangunan Kota/ Kabupaten
  - 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan kemiskinan
  - 2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
  - 2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran
  - 2.4 Kesenjangan Wilayah
3. Penyebab Permasalahan Pembangunan
  - 3.1 Ketergantungan pada Sektor Pariwisata dan Pertanian yang Tidak Didukung Pertumbuhan Jasa Hiburan dan Rekreasi dan Industri
  - 3.2 Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
  - 3.3 Rendahnya Kualitas Lapangan Kerja yang Tersedia
  - 3.4 Kualitas Infrastruktur yang Baik Seharusnya Dapat Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi
  - 3.5 Kualitas Sumber Daya Manusia
  - 3.6 Dana Simpanan Masyarakat Sebagai Investasi Produksti Masih Terbatas
  - 3.7 Rendahnya Kualitas Belanja Daerah
4. Prospek Pembangunan Tahun 2015
5. Penutup
  - 5.1 Isu Strategis Daerah
  - 5.2 Rekomendasi Kebijakan



Desember 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH



# Perkembangan Pembangunan Provinsi Bali 2014

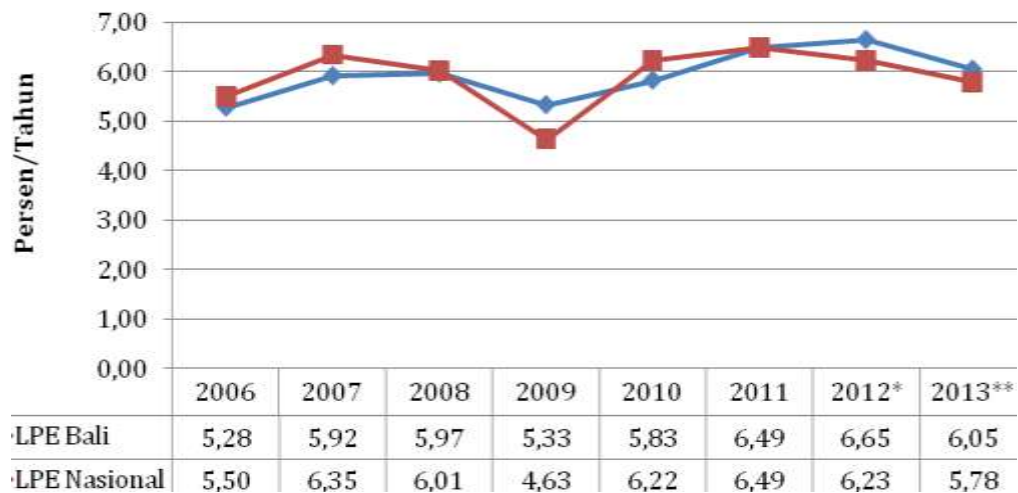
## SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

### A. Perkembangan Indikator Utama

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Bali merupakan salah satu daerah tujuan wisata dunia yang memiliki potensi keindahan alam serta keunikan budaya dan kehidupan sosial masyarakatnya. Sektor pariwisata menjadi sektor andalan perekonomian Bali, sekaligus menjadi barometer bagi kemajuan pariwisata Indonesia. Kinerja perekonomian Bali selama periode 2006-2013 cukup baik, terlihat dari besarnya PDRB yang tumbuh dengan laju rata-rata 5,94 persen sama dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional (Gambar 1). Besarnya PDRB di Provinsi Bali turut berkontribusi sebesar 2,12 persen terhadap pembentukan PDRB Jawa Bali, dan menyumbang sebesar 1,25 persen terhadap pembentukan PDB nasional.

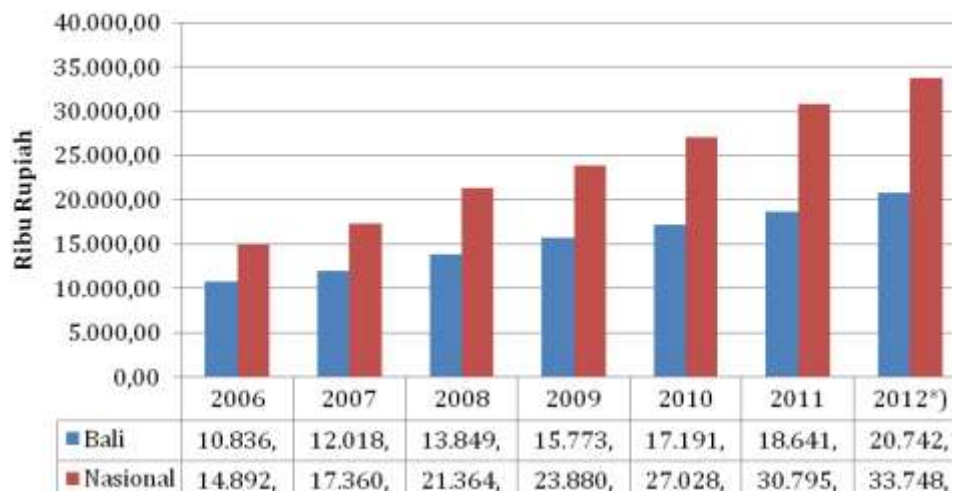
**Gambar 1**  
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2000



Sumber: BPS, 2013

Kinerja pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dari besarnya PDRB per kapita di Provinsi Bali lebih rendah dari angka rata-rata nasional. Pada tahun 2006, rasio antara PDRB perkapita Provinsi Bali dan PDB nasional sebesar 72,76 persen, dan menurun menjadi 61,46 persen pada tahun 2012 (Gambar 2). Untuk itu, diperlukan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat

**Gambar 2**  
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

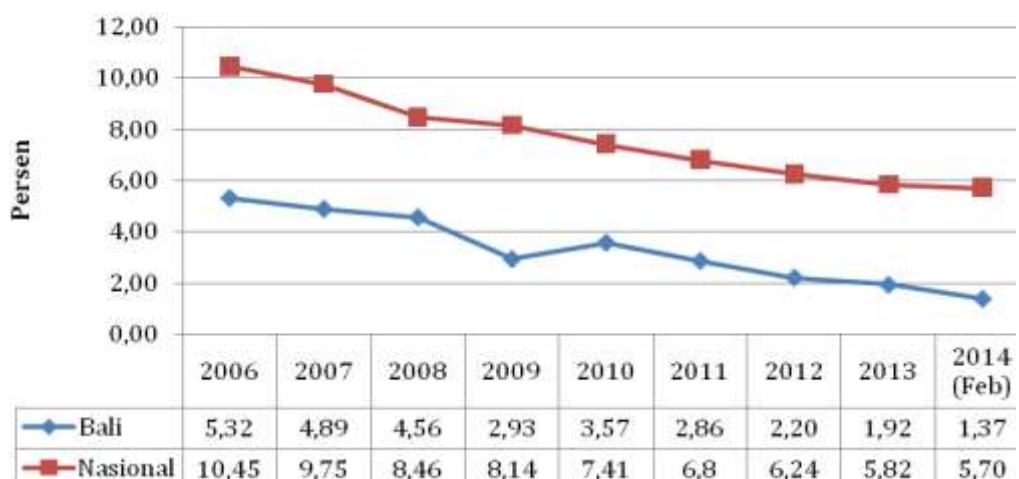


Sumber: BPS, 2013

## 2. Pengangguran

Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran wilayah cenderung menurun. Bahkan dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional, TPT Provinsi Bali termasuk rendah (Gambar 3). TPT Provinsi Bali selama 2006-2013 berkurang sebesar 3,40 persen. Rendahnya tingkat pengangguran dengan pendapatan perkapita rendah mengindikasikan rendahnya produktivitas pekerja daerah.

**Gambar 3**  
Tingkat Pengangguran Terbuka



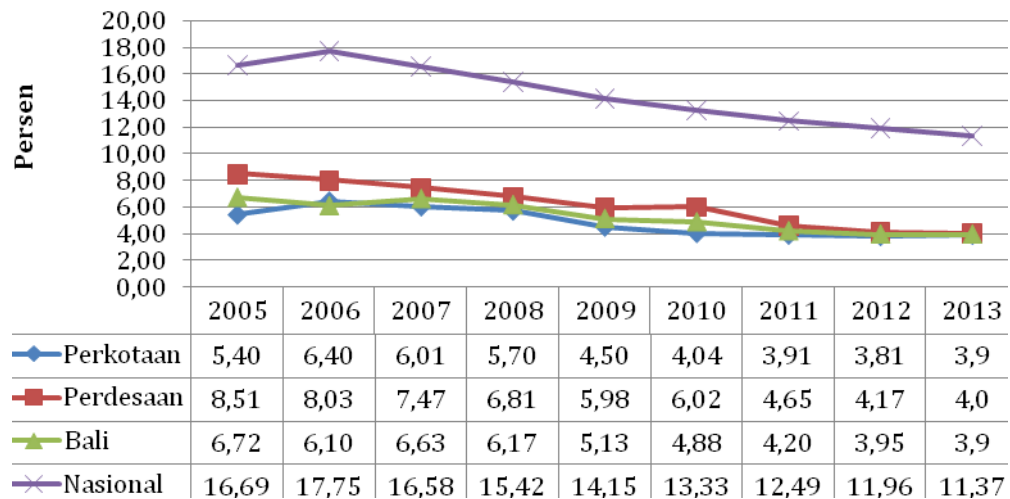
Sumber: BPS, 2014

## 3. Pengurangan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi juga memberi dampak positif bagi penurunan kemiskinan wilayah. Persentase penduduk miskin di Provinsi Bali cenderung menurun selama periode 2006-2013, khususnya di perkotaan. Tingkat kemiskinan di Bali juga jauh di bawah

tingkat kemiskinan nasional. Pada tahun 2013 persentase penduduk miskin di Bali sebesar 3,95 persen sedangkan kemiskinan di tingkat nasional sebesar 11,37 persen. Di tingkat wilayah Jawa dan Bali kondisi kemiskinan di Provinsi Bali ini merupakan yang terendah kedua setelah Provinsi DKI Jakarta. Pariwisata di Provinsi Bali beserta kegiatan turunannya turut mendukung perekonomian masyarakat sehingga tingkat kemiskinan rendah.

**Gambar 4**  
**Persentase Penduduk Miskin**



Sumber: BPS, 2013

## B. Kinerja Pembangunan Kabupaten/ Kota

Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja.

### 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

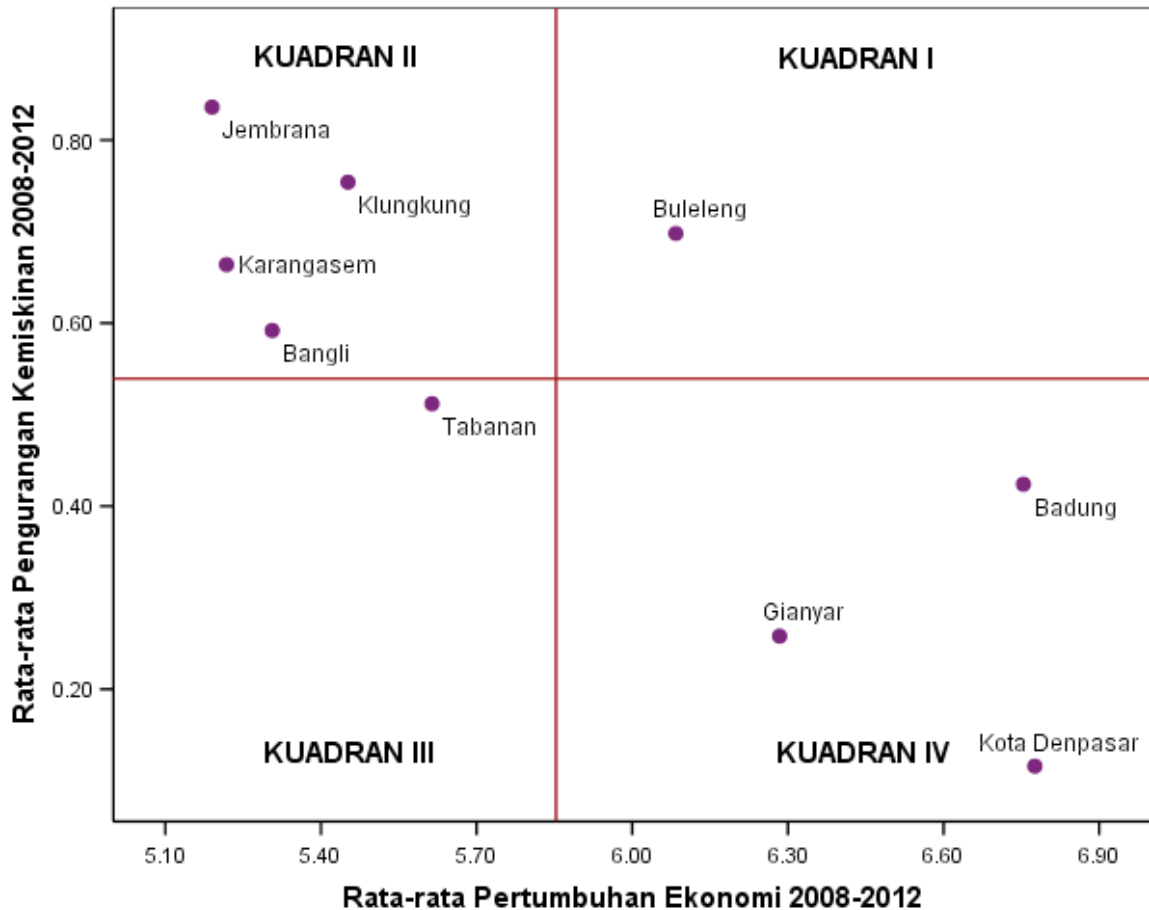
Gambar 5 menunjukkan persebaran kabupaten dan kota di Provinsi Bali menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dengan penjelasan sebagai berikut.

Pertama Kabupaten Buleleng termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (*pro-growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan.

Kedua, Kabupaten Jembrana, Klungkung, Karangasem, dan Bangli terletak di kuadran II, termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (*low growth, pro-poor*). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan

pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa.

**Gambar 5**  
**Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2008-2012**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Ketiga, Kabupaten Tabanan terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

Keempat, Kabupaten Gianyar, Badung, dan Kota Denpasar terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan

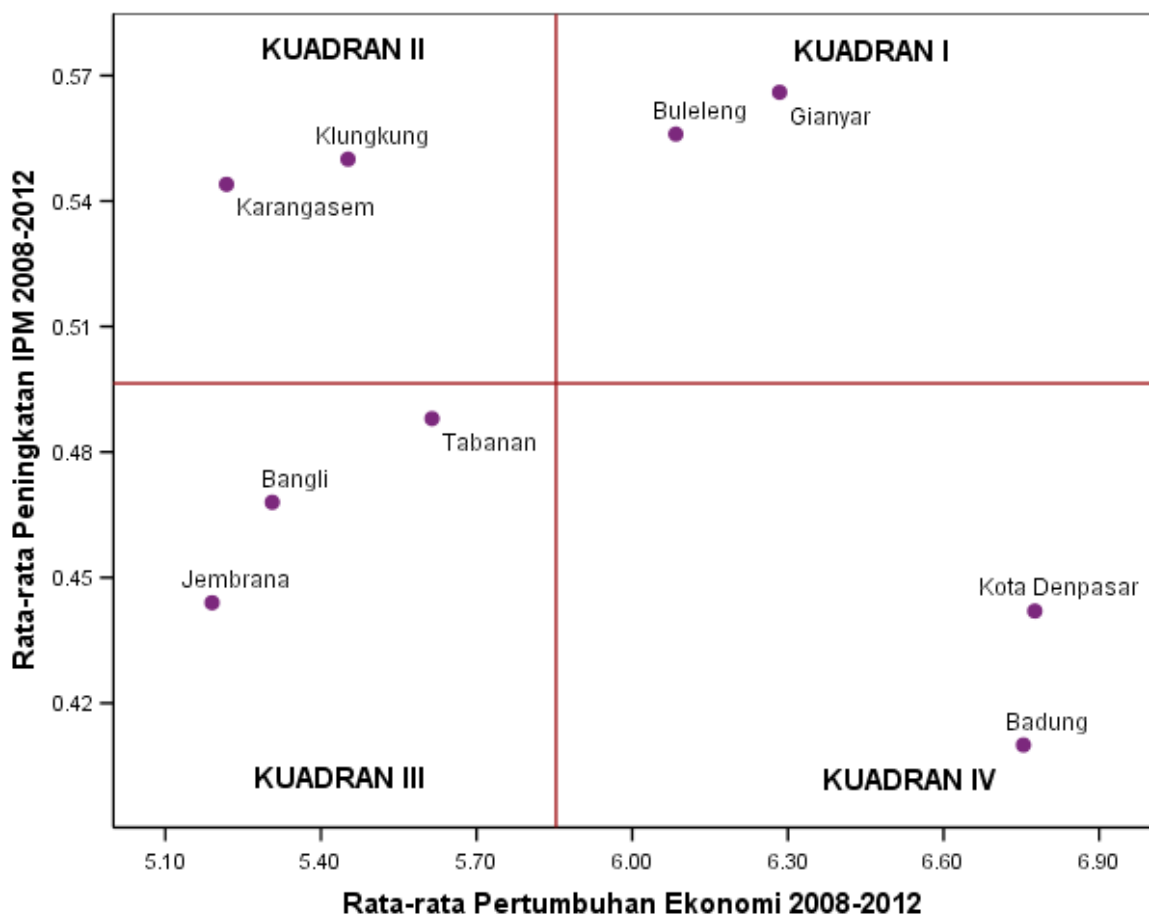


angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah meningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

## 2. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM

Gambar 6 menunjukkan distribusi kabupaten dan kota di Provinsi Bali berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2012.

**Gambar 6**  
**Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM Tahun 2008-2012**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Pertama, Kabupaten Buleleng dan Gianyar merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kedua, Kabupaten Karangasem dan Klungkung yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (*low growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Ketiga, Kabupaten Bangli, Jembrana dan Tabanan terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

Keempat, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

### **3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran**

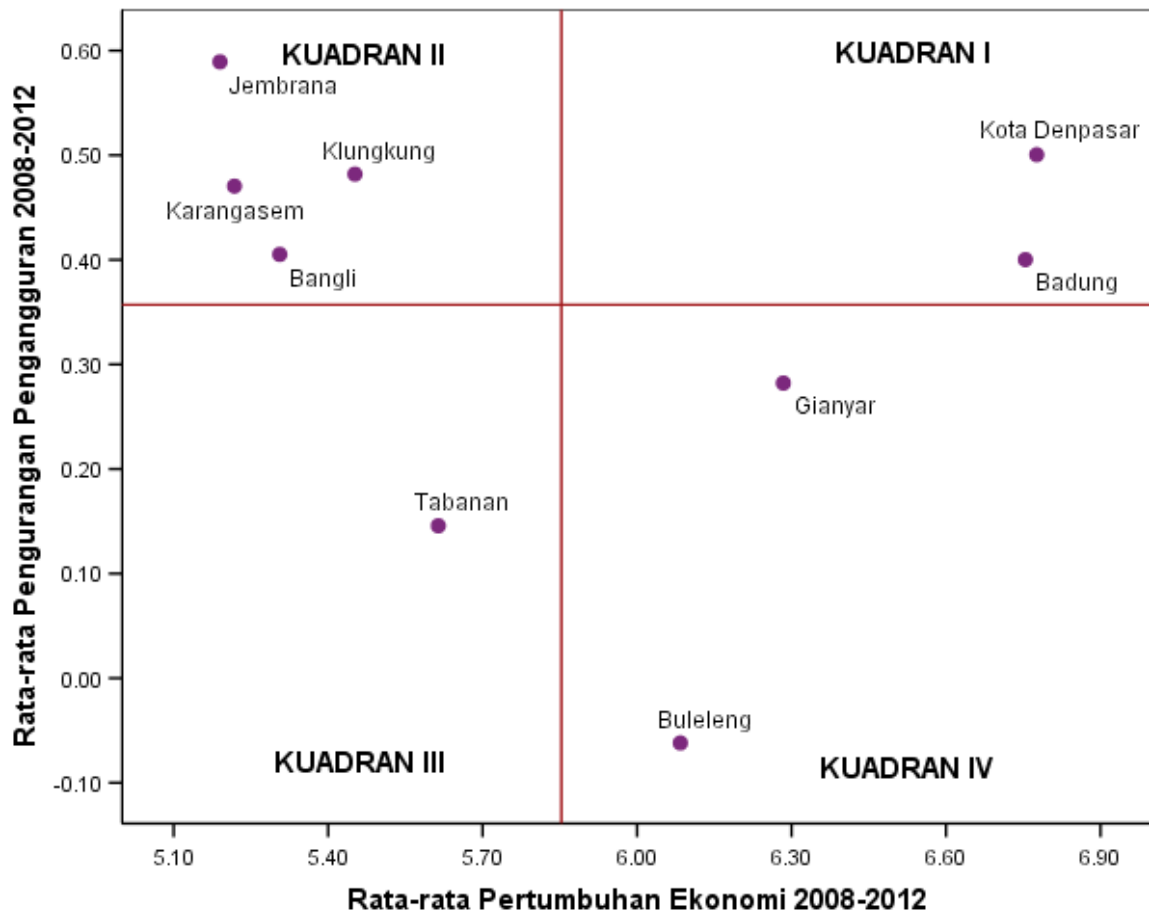
Gambar 7 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Bali menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2012. Pertama, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar termasuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (*pro-growth, pro-job*). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Kedua, Kabupaten Bangli, Jembrana, Karangasem, dan Klungkung yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (*low growth, pro-job*). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan.

Ketiga, Kabupaten Tabanan terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-job*). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.



**Gambar 7**  
**Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap**  
**Rata-Rata Pengurangan Jumlah Pengangguran Tahun 2008-2012**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

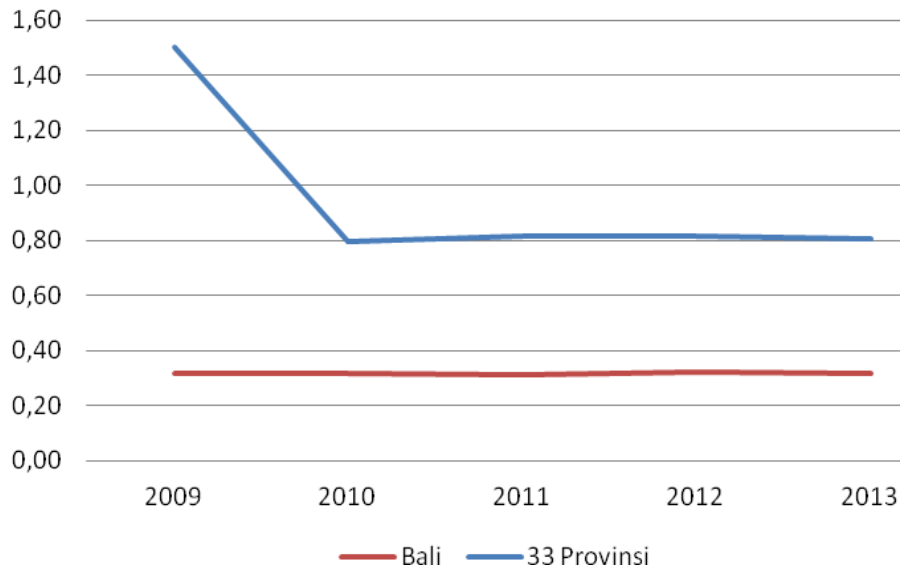
Keempat, Kabupaten Buleleng dan Gianyar terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro job*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung migrasi penduduk dari daerah perdesaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.

#### 4. Kesenjangan Ekonomi

Tingkat kesenjangan ekonomi yang terjadi di Bali berkategori sedang, menunjukkan perekonomian di kabupaten/ kota di provinsi ini belum merata. Nilai indeks williamson dari tahun 2009 – 2013 Provinsi Bali cenderung konstan namun masih berada di bawah rata-rata nasional. Penyebab kesenjangan ekonomi di Provinsi Bali apabila

dikaitkan dengan struktur perekonomian adalah persebaran yang tidak merata dari titik-titik destinasi pariwisata sehingga terdapat ketimpangan dalam menikmati benefit ekonomi dari aktivitas pariwisata.

**Gambar 8**  
**Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson)**  
**Provinsi Bali Tahun 2009-2013**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Bali cukup tinggi, terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah (Tabel 1). Kesenjangan yang ditimbulkan juga relatif besar antarwilayah yang memiliki sektor pariwisata dengan yang tidak, terutama untuk wilayah Badung dan Denpasar dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Mayoritas sektor pariwisata menyebabkan pertumbuhan ekonomi Badung lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya sehingga seringkali terjadi adanya alih fungsi lahan pertanian. Sektor pariwisata di Provinsi Bali terkonsentrasi di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Gianyar sehingga berpengaruh terhadap tingginya pendapatan perkapita di ketiga daerah tersebut.

**Tabel 1**  
**Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Bali Tahun 2007-2012 (000/jiwa)**

Kab/Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jembrana	9.768	11.283	12.649	13.722	14.740	16.377
Tabanan	8.475	9.784	10.838	11.965	12.874	14.119
Badung	18.428	20.988	24.673	27.296	29.578	32.850
Gianyar	10.653	12.268	13.878	15.552	16.932	18.706
Klungkung	11.036	12.766	14.423	16.056	17.365	19.121
Bangli	7.664	8.714	9.926	10.922	11.737	12.962
Karang Asem	7.051	8.167	9.319	10.394	11.454	12.766

Kab/Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Buleleng	8.275	9.552	10.799	12.063	13.011	14.218
Kota Denpasar	11.264	12.832	14.123	15.753	17.215	18.635
<b>BALI</b>	<b>12.018</b>	<b>13.850</b>	<b>15.774</b>	<b>17.191</b>	<b>18.641</b>	<b>20.743</b>

Sumber: BPS, 2013

### C. Penyebab Permasalahan Pembangunan

#### 1. Ketergantungan pada Sektor Pariwisata dan Pertanian yang Tidak Didukung Pertumbuhan Jasa Hiburan dan Rekreasi dan Industri

Struktur perekonomian Provinsi Bali didominasi sektor perdagangan, hotel, restoran yang menyumbang 29,89 persen dalam PDRB, diikuti oleh sektor pertanian dan jasa-jasa (Tabel 2). Sektor perdagangan, hotel, dan restoran juga menjadi pendorong utama pertumbuhan wilayah Di Bali. Perkembangan pariwisata di Bali terlihat pada meningkatnya pendapatan yang dihasilkan pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran, yaitu dalam bentuk pengeluaran untuk akomodasi, konsumsi makananm angkutan wisata, dan jasa-jasa lainnya. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Bali menciptakan dampak langsung terhadap sektor perdagangan, hotel, dan restoran sehingga meningkatkan PDRB wilayah. Secara struktural pertumbuhan sektor tersier di Bali lebih tinggi daripada sektor primer dan sekunder.

**Tabel 2**  
**Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha (2013)**

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	<b>Pertanian</b>	<b>16,82</b>	<b>17,69</b>
2.	Pertambangan	0,80	0,75
3.	Industri Pengolahan	8,72	9,85
4.	Listrik, Gas, Air Minum	2,08	1,60
5.	Konstruksi	5,14	4,48
6.	<b>Perdagangan, Hotel, Restoran</b>	<b>29,89</b>	<b>32,14</b>
7.	Angkutan, Telekomunikasi	14,25	11,08
8.	Keuangan	6,74	7,31
9.	<b>Jasa-jasa</b>	<b>15,56</b>	<b>15,08</b>
		100,00	100,00

Sumber: BPS, 2013

Di antara sektor-sektor *tradable* (dapat diperdagangkan antardaerah), sektor pertanian memiliki peranan penting. Berdasarkan analisis *location quotient* (LQ), sektor perekonomian di Bali yang merupakan sektor basis daerah antara lain pertanian, perdagangan, hotel, dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, serta jasa (Tabel 3). Hal ini menunjukkan Provinsi Bali memiliki *proportional share* lebih besar dari rata-rata daerah lain untuk sektor-sektor tersebut.

**Tabel 3**  
**Nilai LQ Sektor Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2008-2012**

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
<b>1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan</b>	1,51	1,52	1,51	1,49	1,48
a. Tanaman Bahan Makanan	1,55	1,49	1,46	1,49	1,46
b. Tanaman Perkebunan	0,42	0,46	0,47	0,44	0,43
c. Peternakan	2,71	2,96	3,10	2,99	3,13
d. Kehutanan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
e. Perikanan	2,05	2,07	1,96	1,83	1,72
<b>2. Pertambangan dan Penggalian</b>	0,07	0,07	0,08	0,09	0,10
a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Pertambangan Bukan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Penggalian	0,61	0,60	0,67	0,69	0,74
<b>3. Industri Pengolahan</b>	0,38	0,39	0,39	0,38	0,38
a. Industri Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1). Pengilangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Gas Alam Cair (LNG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Bukan Migas	0,41	0,42	0,43	0,41	0,41
<b>4. Listrik, Gas &amp; Air Bersih</b>	2,10	1,91	1,95	2,00	2,04
a. Listrik	2,41	2,33	2,36	2,36	2,34
b. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Air Bersih	3,87	3,89	3,97	4,05	4,38
<b>5. Konstruksi</b>	0,65	0,61	0,61	0,62	0,69
<b>6. Perdagangan, Hotel &amp; Restoran</b>	1,80	1,88	1,84	1,83	1,78
a. Perdagangan Besar dan Eceran	0,81	0,85	0,86	0,87	0,89
b. Hotel	16,83	16,71	16,32	16,13	14,83
c. Restoran	3,58	3,50	3,57	3,57	3,49
<b>7. Pengangkutan dan Komunikasi</b>	1,39	1,25	1,17	1,12	1,09
a. Pengangkutan	2,53	2,49	2,46	2,41	2,42
1). Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Angkutan Jalan Raya	1,37	1,35	1,38	1,35	1,30
3). Angkutan Laut	1,26	1,29	1,37	1,51	1,56
4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	1,25	1,24	1,24	1,30	1,31
5). Angkutan Udara	6,74	6,36	5,64	5,20	5,29
6). Jasa Penunjang Angkutan	2,49	2,40	2,40	2,36	2,32
b. Komunikasi	0,45	0,38	0,35	0,33	0,32
<b>8. Keuangan, Real Estate &amp; Jasa Perusahaan</b>	0,75	0,72	0,74	0,74	0,75
a. Bank	0,51	0,51	0,54	0,56	0,59
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0,79	0,73	0,73	0,73	0,71
c. Jasa Penunjang Keuangan	4,03	4,09	4,20	4,09	4,11
d. Real Estat	1,22	1,18	1,18	1,15	1,15
e. Jasa Perusahaan	0,37	0,34	0,34	0,33	0,34
<b>9. Jasa-jasa</b>	1,45	1,43	1,47	1,51	1,54

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
a. Pemerintahan Umum	1,76	1,77	1,87	1,94	1,99
b. Swasta	1,20	1,16	1,16	1,20	1,23
1). Jasa Sosial Kemasyarakatan	0,25	0,23	0,26	0,25	0,24
2). Jasa Hiburan dan Rekreasi	0,96	0,92	0,94	0,91	0,91
3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga	1,59	1,54	1,53	1,59	1,64

Nilai LQ dihitung menggunakan PDRB ADHK Tahun 2000

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Hal lain yang perlu dikembangkan adalah sektor industri pengolahan di Provinsi Bali, terutama industri pengolahan makanan. Ada dua alasan yang mendukung hal tersebut. Pertama, sektor pertanian primer memiliki elastisitas permintaan yang rendah terhadap pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan relatif bertahannya kinerja pertumbuhan sektor pertanian di masa krisis, namun ketika situasi ekonomi membaik dan pendapatan masyarakat meningkat permintaan terhadap komoditas pertanian tidak meningkat dengan proporsi yang sama. Berbeda halnya dengan permintaan terhadap produk pengolahan, yang sangat elastis terhadap peningkatan pendapatan. Kedua, sektor industri pengolahan sangat potensial dalam menciptakan nilai tambah, mendorong perkembangan sektor-sektor lain (*multiplier effect*), dan menciptakan lapangan kerja.

**Tabel 4**  
**Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 2010-2014**

No.	Lapangan Pekerjaan	2010	2014 (Feb)	Perubahan
1	Pertanian	673.928	590.169	-83.759
2	Pertambangan	7.150	15.601	8.451
3	Industri Pengolahan	304.728	337.080	32.352
4	Listrik, Gas, Air	6.807	3.056	-3.751
5	Bangunan	123.421	230.524	107.103
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	472.840	674.595	201.755
7	Angkutan & Telekomunikasi	86.399	71.982	-14.417
8	Keuangan	53.087	73.168	20.081
9	Jasa-Jasa	312.977	381.219	68.242
	Total	2.041.337	2.377.394	336.057

Sumber : BPS, 2014

Selama periode 2010-2014 sektor perekonomian yang menyerap tenaga kerja signifikan adalah sektor industri pengolahan, bangunan, serta perdagangan hotel dan restoran. Peningkatan terbesar pada perubahan jumlah orang yang bekerja di Provinsi Bali adalah pada perdagangan hotel dan restoran (Tabel 4). Ke depan, sektor industri pengolahan dapat dikembangkan lagi sehingga mampu menyerap angkatan kerja baru dan menyerap tenaga kerja yang menumpuk di sektor bangunan yang kurang produktif. Pengembangan sektor industri pengolahan tetap harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan sehingga tidak menciptakan alih fungsi lahan pertanian produktif di Bali.

## 2. Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Dari sisi pengeluaran (penggunaan) pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali adalah sektor impor dan ekspor (Tabel 5). Sektor investasi (PMTB) sebagai sektor yang penting bagi pertumbuhan daerah berkontribusi 35,98 persen. Investasi akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. stok kapital di daerah yang digunakan untuk memproduksi. Tingkat investasi yang rendah akan diikuti oleh terbatasnya kemampuan daerah untuk memacu peningkatan produksi. Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam daerah tergantung dari besarnya investasi dan kemampuan sumber daya manusia dalam memaksimalkan potensi dan peluang investasi. Hal yang mengkhawatirkan adalah adanya tren peningkatan impor per tahun yang besar dan lebih tinggi dari pada ekspor. Impor yang terlalu besar tentu saja tidak baik bagi suatu daerah, karena dapat menciptakan persaingan bagi produk lokal. Dari sumber pertumbuhan, ekspor, impor, dan konsumsi rumah tangga merupakan tiga besar yang paling berpengaruh.

**Tabel 5**  
**PDRB Menurut Penggunaan 2013**

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Konsumsi Rumah Tangga	57,46	5,28
2.	Konsumsi Lembaga Nirlaba	0,97	1,15
3.	Konsumsi Pemerintah	16,91	10,89
4.	PMTB	35,98	31,52
5.	Perubahan Stok	0,40	0,23
6.	Ekspor	114,38	77,27
7.	Impor	126,11	79,34
Total		100,00	100,00

Sumber : BPS, 2013

Berdasarkan kondisi tersebut, agar pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pentingnya membatasi dan menyeleksi impor yang masuk, baik barang dan jasa.
2. Mengurangi ketergantungan terhadap ekspor. Pertumbuhan yang terlalu bertumpu pada ekspor sangat rentan terhadap gejolak ekonomi dunia. Kontraksi sektor-sektor yang berorientasi ekspor berpotensi diikuti pengurangan tenaga kerja yang dapat berakibat pada meningkatnya pengangguran di daerah.
3. Mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi masyarakat. Pertumbuhan yang terlalu bertumpu pada konsumsi masyarakat memiliki batas dan tidak berkelanjutan. Dalam jangka menengah kondisi ini akan mengurangi potensi tabungan masyarakat. Padahal tabungan sangat penting bagi perekonomian karena dapat menjadi sumber investasi sektor produktif melalui intermediasi perbankan.
4. Mendorong terciptanya keseimbangan sumber-sumber pertumbuhan khususnya dengan meningkatkan peran investasi (pembentukan modal tetap bruto) dalam

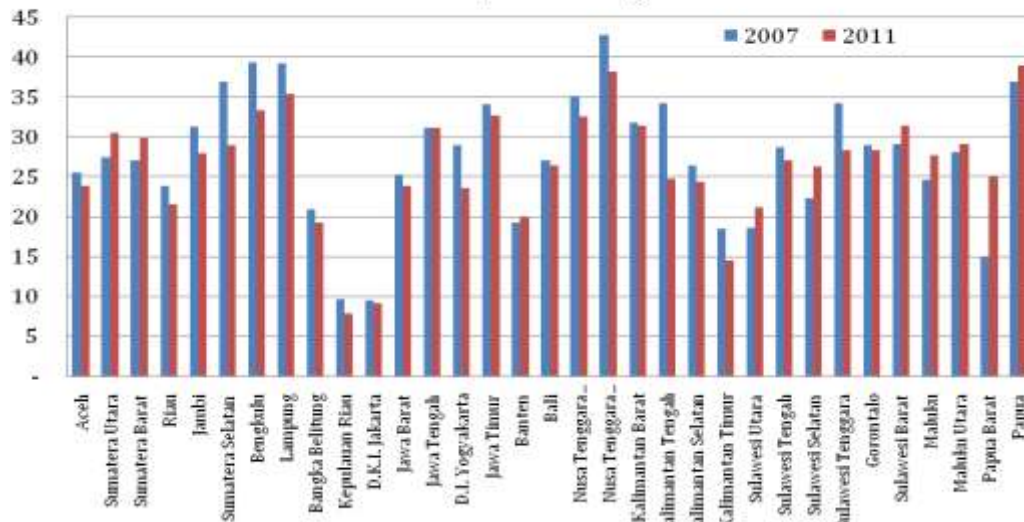


perekonomian daerah. Investasi daerah merupakan salah satu cara untuk dapat meningkatkan produksi daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

### 3. Rendahnya Kualitas Lapangan Kerja yang Tersedia

Rendahnya tingkat pengangguran berkaitan dengan rendahnya kualitas lapangan kerja di Provinsi Bali. Hal ini bisa ditelusuri dari besarnya jumlah pekerja bebas di sektor pertanian, pekerja bebas di sektor non-pertanian, dan pekerja tidak dibayar. Mereka ini terhitung bekerja namun menghadapi ketidakpastian yang tinggi sehingga sangat rentan terhadap sedikit saja guncangan ekonomi yang terjadi. Persentase pekerjaan yang kurang berkualitas di Bali sangat berfluktuasi. Meskipun persentasenya menurun dari tahun 2007 ke 2011, namun persentase pekerjaan kurang berkualitas di Bali sebesar 26,37 persen hanya sedikit di bawah rata-rata nasional sebesar 26,50 persen.

**Gambar 9**  
Persentase Pekerjaan Kurang Berkualitas



Sumber: BPS, 2012

Kebijakan pembangunan sektor pertanian harus berjalan seiring dengan kebijakan pembangunan sektor industri karena terdapat penumpukan tenaga kerja di sektor pertanian namun produktivitas di sektor ini rendah. Pengembangan industri yang sesuai oleh karena adalah industri berbasis pertanian dalam arti luas (agroindustri) yang didukung oleh rantai perdagangan (agrobisnis).

### 4. Kualitas Infrastruktur yang Baik Seharusnya Dapat Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah. Pembangunan ekonomi juga membutuhkan dukungan sarana transportasi dan ketersediaan jaringan listrik yang memadai. Secara keseluruhan wilayah Bali dilayani oleh jaringan jalan sepanjang 7.530 km. Jika dilihat dari sisi kuantitas sebenarnya ketersediaan jaringan jalan di Provinsi Bali cukup baik, terlihat dari indikator kerapatan jalan, yang

menunjukkan rasio panjang jalan dalam kilometer terhadap luas wilayah dalam kilometer persegi, dan dinyatakan dalam persen (Tabel 6). Angka kepadatan jalan (*road density*) di wilayah ini lebih jauh tinggi dari angka nasional dan berada di peringkat 3 nasional.

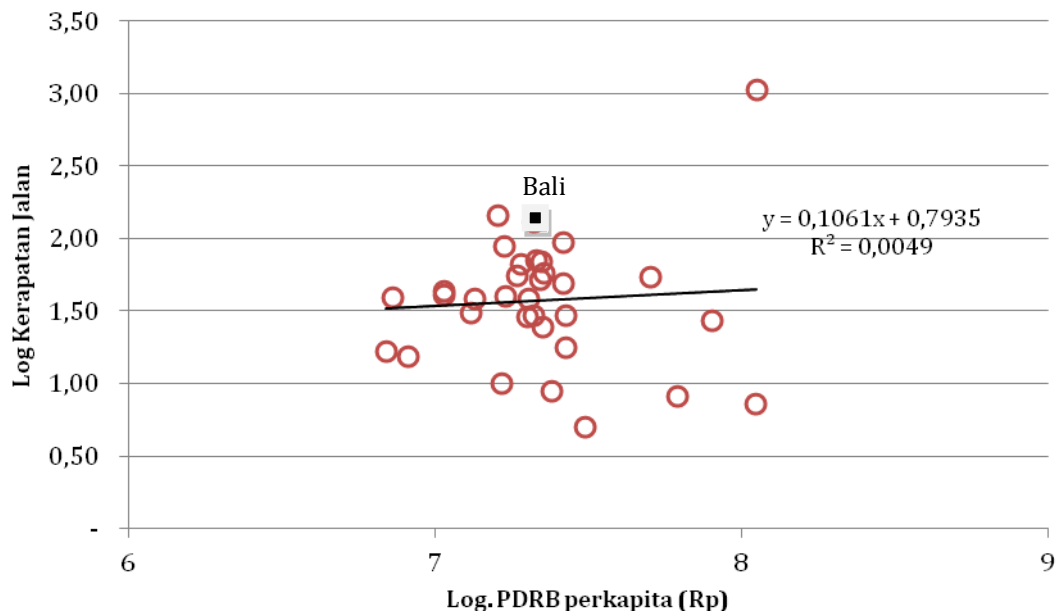
**Tabel 6**  
**Kepadatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2012**

No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kepadatan Jalan
1	DKI Jakarta	111.913	1.068,36
2	DIY	16.054	146,56
<b>3</b>	<b>Bali</b>	<b>20.948</b>	<b>130,28</b>
4	Jawa Timur	26.274	95,37
5	Jawa Tengah	16.864	88,75
6	Jawa Barat	21.274	72,08
7	Sulawesi Selatan	22.151	69,68
8	Banten	19.038	66,81
9	Sulawesi Utara	22.624	57,89
10	Lampung	18.460	56,44
11	Kep. Riau	50.174	54,95
12	Sumatera Barat	22.035	52,36
13	Sumatera Utara	26.185	49,50
14	NTB	10.691	43,55
15	Gorontalo	10.703	40,85
16	Sulawesi Barat	17.012	40,62
17	NTT	7.236	39,95
18	Bengkulu	13.522	38,99
19	Aceh	20.164	38,76
20	Sulawesi Tenggara	13.112	30,71
21	Kep. Bangka Belitung	26.784	29,93
22	Sulawesi Tengah	21.052	29,73
23	Kalimantan Selatan	20.051	29,28
24	Riau	79.786	27,25
25	Jambi	22.508	24,81
26	Sumatera Selatan	26.742	17,86
27	Maluku Utara	6.929	16,72
28	Maluku	8.134	15,39
19	Kalimantan Barat	16.421	10,00
30	Kalimantan Tengah	23.987	8,96
31	Papua Barat	61.462	8,24
32	Kalimantan Timur	111.210	7,22
33	Papua	30.713	5,06
	<b>Indonesia</b>	<b>33.531</b>	<b>25,99</b>

Sumber: BPS (2012), Statistik Kementerian PU (2013)

Berdasarkan asumsi terdapat korelasi antara tingkat kepadatan jalan dan tingkat pendapatan perkapita dalam suatu perekonomian, terlihat hubungan positif antara PDB per kapita dan tingkat kepadatan jalan (Gambar 10). Semakin tinggi pendapatan per kapita wilayah kepadatan jalannya cenderung tinggi pula. Wilayah yang posisinya di bawah kurva linier tersebut berarti mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Dengan menggunakan ukuran ini terlihat bahwa posisi Bali relatif lebih baik dibandingkan provinsi lain. Dengan demikian panjang jalan bukan merupakan permasalahan utama bagi Bali

**Gambar 10**  
**Hubungan antara Kerapatan Jalan dan GDP Per Kapita Tahun 2012**



Sumber: BPS (2013), Statistik Kementerian PU (2013)-diolah

Secara kualitas, kondisi jalan di Provinsi Bali relatif baik, ditunjukkan dari panjang jalan yang sudah beraspal di provinsi ini. Permukaan jalan beraspal di Provinsi Bali sudah mencapai 81 persen pada tahun 2012 (Tabel 7), menunjukkan daya dukung jalan untuk pergerakan barang relatif baik. Kondisi jalan yang buruk akan meningkatkan waktu tempuh perjalanan dan membengkakkan biaya distribusi barang antar daerah, yang pada gilirannya menghambat perekonomian daerah. Dengan adanya perbedaan kapasitas fiskal antardaerah, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi upaya peningkatan integrasi jaringan jalan antarwilayah.

**Tabel 7**  
**Panjang Jalan Nasional Menurut Jenis Permukaan Tahun 2012**

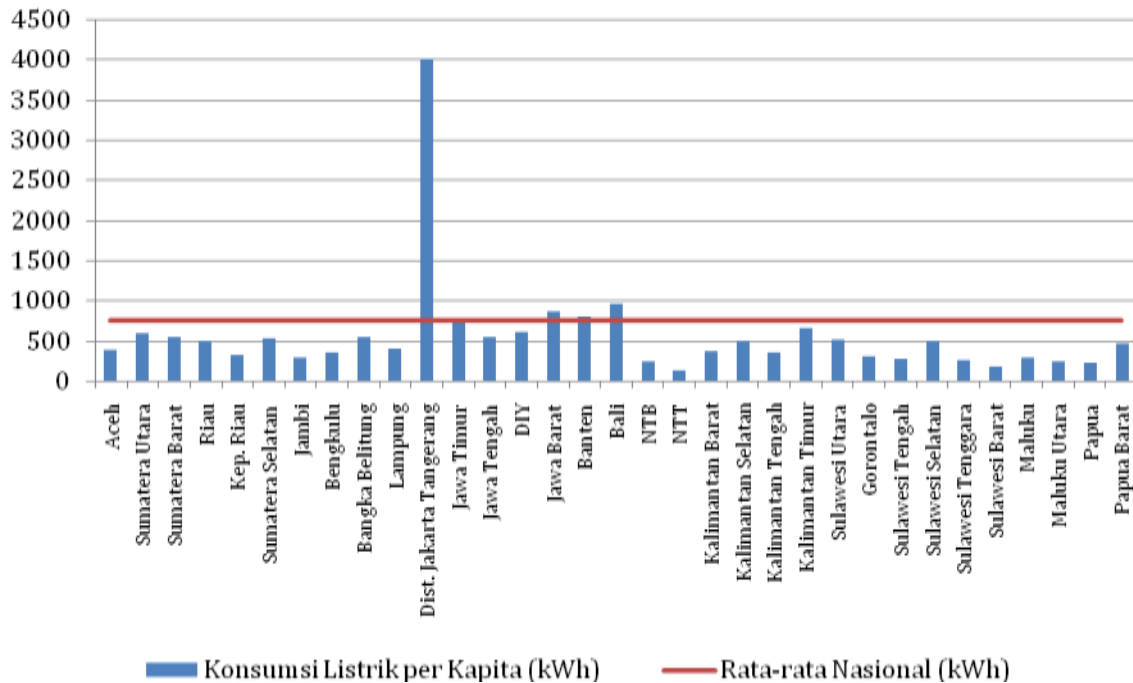
PROVINSI	JENIS PERMUKAAN JALAN								Total	
	Aspal		Kerikil		Tanah		Lainnya			
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Bali	717	81	95	11	66	8	5	0	883	100
Jawa	11.081	73	896	6	625	4	2.688	17	15.270	100
INDONESIA	42.284	79	5018	9	3504	7	2836	5	53.642	100

Sumber: BPS, 2012

Infrastruktur lain yang mendorong produktivitas daerah adalah jaringan listrik. Konsumsi listrik di Bali termasuk rendah dan kurang dari rata-rata tingkat konsumsi listrik nasional sebesar 753,7 kWh (Gambar 11). Untuk mengukur defisiensi terhadap infrastruktur kelistrikan digunakan cara yang sama, yaitu dengan melihat korelasi antara pendapatan perkapita dan konsumsi listrik perkapita. Dengan menggunakan data 33

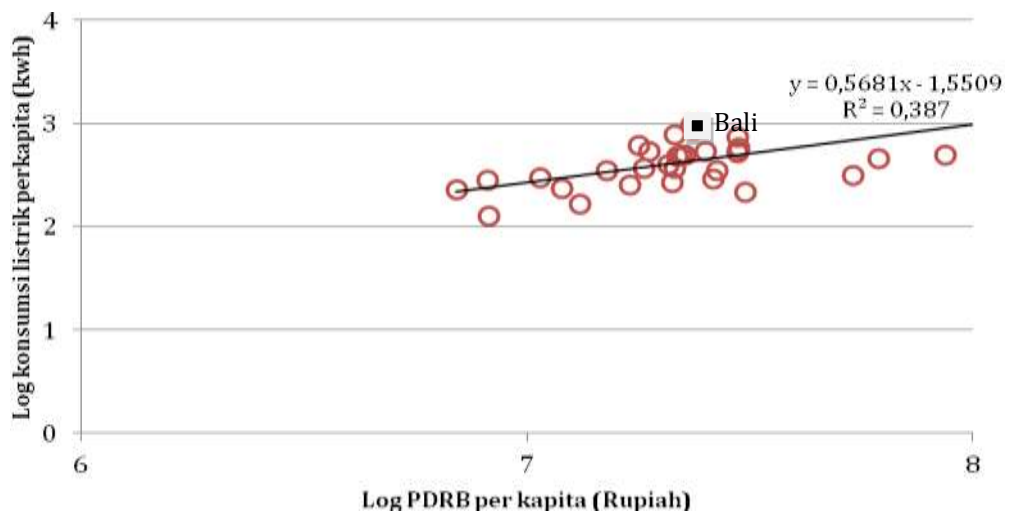
provinsi, terlihat hubungan yang positif antara PDB per kapita dengan tingkat konsumsi listrik (Gambar 12). Provinsi Bali posisinya berada di atas kurva linier, menunjukkan bahwa dibandingkan provinsi lain Bali tidak mengalami defisiensi infrastruktur listrik.

**Gambar 11**  
**Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2013**



Sumber: Statistik PLN, 2013

**Gambar 12**  
**Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2013**

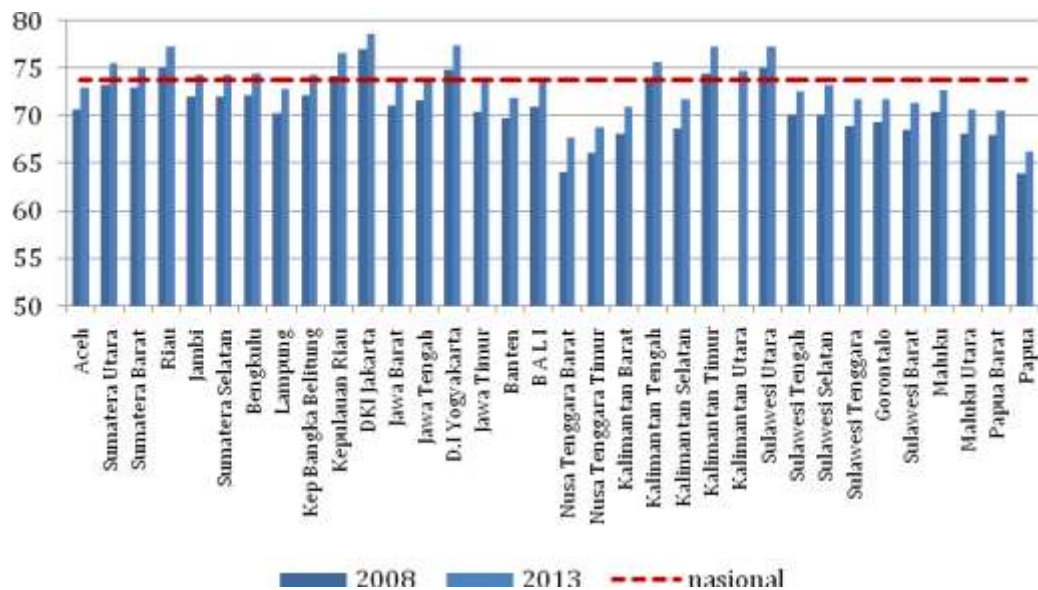


Sumber: BPS (2013), Statistik PLN (2013) - diolah

## 5. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia di Bali yang ditunjukkan melalui nilai IPM relatif meningkat tahun 2013 dibandingkan tahun 2008 dan sudah berada di atas IPM nasional sebesar 73,81 (Gambar 13).

**Gambar 13**  
**Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2008 dan 2013**



Sumber: BPS, 2013

IPM Provinsi Bali menduduki peringkat ke-15 secara nasional pada tahun 2013 dengan nilai IPM sebesar 74,11. Pada indikator usia harapan hidup, terjadi perbaikan dari angka 70,6 tahun pada tahun 2008 menjadi 71,2 tahun pada tahun 2013. Rata-rata lama sekolah di Provinsi Bali meningkat dari 7,8 tahun pada 2008 menjadi 8,6 tahun pada 2013. Sementara itu pada indikator angka melek huruf, capaian di Provinsi Bali pada tahun 2008 dan 2013 meningkat dari 86,9 menjadi 91,0 persen, lebih rendah dari angka nasional sebesar 94,14.

Perbaikan kualitas sumber daya manusia juga tercermin dari komposisi angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Apabila dilihat dari struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, proporsi angkatan kerja dengan ijazah minimal SMA meningkat dari 22,58 persen pada tahun 2008 menjadi 31,90 persen pada tahun 2014 (Tabel 8). Perbaikan struktur angkatan kerja ini perlu terus didorong untuk mendukung transformasi ekonomi daerah berbasis agroindustri.

**Tabel 8**  
**Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan**

No.	Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	2008	2014 Feb	Perubahan
1	≤ SD	980.619	1.004.561	23.942
2	SMTp	365.369	361.433	(3.936)
3	SMTA Umum	566.825	776.190	209.365
5	Diploma I/II/III/Akademi	83.157	87.811	4.654
6	Universitas	103.308	180.427	77.119
<b>Total</b>		<b>2.099.278</b>	<b>2.410.422</b>	<b>311.144</b>

Sumber: BPS, 2014

## 6. Dana Simpanan Masyarakat Sebagai Investasi Produksi Masih Terbatas

Salah satu sumber pendanaan investasi dan usaha ekonomi masyarakat adalah tabungan masyarakat. Terdapat hubungan yang saling menentukan antara tabungan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui fungsi intermediasi perbankan, tabungan masyarakat akan berkembang apabila dikonversi menjadi investasi di sektor-sektor produktif. Imbal hasil dari investasi ini sebagian akan dikonsumsi dan sebagian akan ditabung oleh masyarakat. Demikian seterusnya sehingga terjadi perputaran dan pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 9**  
**Rasio Simpanan dan Pinjaman di Bank Umum dan BPR Tahun 2013**

Wilayah	Posisi Simpanan di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Posisi Pinjaman di bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan	Rasio PMTB terhadap Simpanan
Bali	66.494	65.163	0,98	0,51
Jawa Bali	2.785.534	2.357.461	0.84	0.42
Nasional	3.575.891	3.322.683	0.92	0.47

Sumber: BPS, 2013

Di Provinsi Bali simpanan yang dapat digunakan sebagai sumber permodalan sebenarnya cukup banyak. Hal ini ditunjukkan oleh rasio kredit terhadap simpanan pada Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) nilainya di bawah satu (Tabel 9). Rasio ini terus meningkat meskipun tidak terlalu pesat, dan masih jauh dari satu. Sebagai perbandingan, rasio kredit terhadap simpanan tahun 2013 untuk wilayah Jawa dan Bali adalah 0,98 dan rasio untuk nasional adalah 0,92. Hal ini mengindikasikan cukup melimpahnya potensi simpanan masyarakat di Bali.

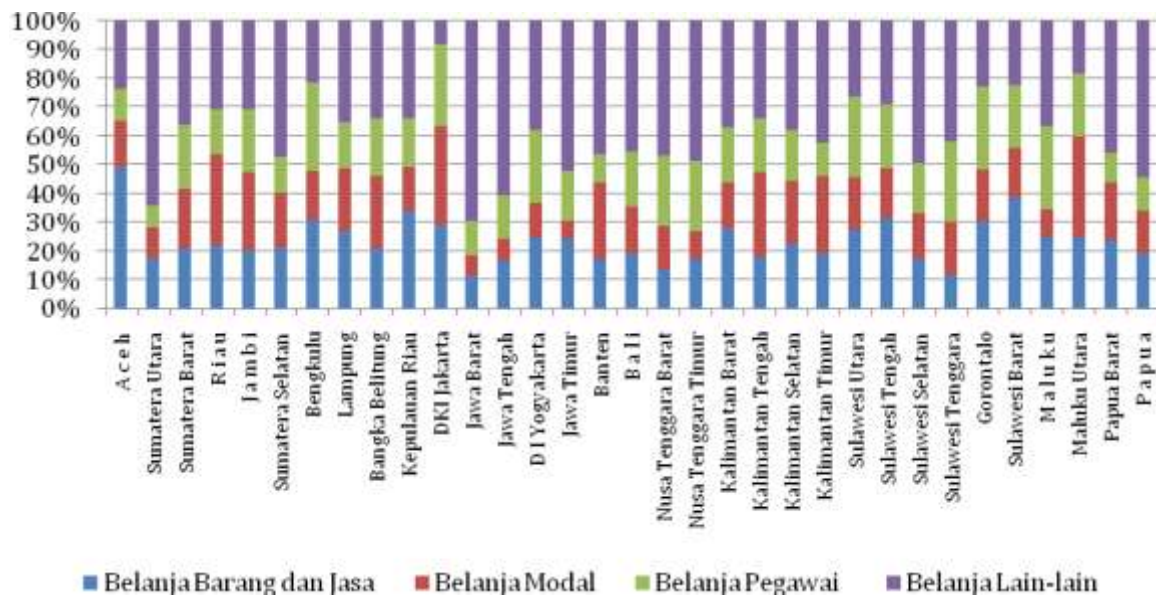
Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) < 1, menunjukkan potensi simpanan masyarakat masih memenuhi untuk pembiayaan investasi di daerah. Hal ini mengindikasikan sebagian besar pinjaman masyarakat yang dilakukan di Bali bersifat konsumtif. Dalam perspektif jangka panjang, pola ini kurang sehat karena pertumbuhan yang digerakkan oleh konsumsi saja tidak akan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya mendorong investasi masyarakat pada sektor produktif, selain upaya mendorong akumulasi tabungan masyarakat.



## 7. Rendahnya Kualitas Belanja Daerah

Investasi pemerintah yang umumnya merupakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana publik yang bersifat *non excludable* dan *non rivalry* memiliki peran yang tidak tergantikan dibandingkan dengan peran swasta. Peran pemerintah semakin penting di daerah-daerah relatif tertinggal, di mana tingkat investasi swasta masih rendah. Pada daerah-daerah ini investasi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan daya tarik daerah melalui pembangunan infrastruktur wilayah seperti jalan, listrik, irigasi, dan prasarana transportasi lainnya, serta peningkatan sumber daya manusia (SDM). Tanpa hal tersebut, sulit diharapkan dunia usaha daerah dapat berkembang.

**Gambar 14**  
**Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2013**



Sumber: BPS, 2013

Komitmen pemerintah daerah dalam memprioritaskan investasi publik dapat ditunjukkan melalui rasio belanja modal pemerintah daerah terhadap total belanja pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Bali. Rasio belanja modal di Provinsi Bali pada tahun 2013 sebesar 15,86 persen dan rasio belanja pegawai sebesar 19,04 persen (Gambar 14). Untuk itu, perlu didorong perbaikan komposisi belanja pemerintah daerah ini yang lebih mengarah pada belanja modal. Belanja modal memiliki dampak langsung yang relatif besar kepada perekonomian. Meskipun secara umum porsi investasi pemerintah lebih kecil dibandingkan investasi swasta, namun perannya tidak tergantikan dalam suatu perekonomian. Pembangunan prasarana publik seperti jalan, saluran irigasi, dan jaringan listrik mutlak memerlukan peran pemerintah. Peran investasi pemerintah ini dirasa semakin penting di daerah-daerah yang level investasi swastanya relatif rendah. Investasi pemerintah dalam konteks ini adalah sebagai perintis dan pembuka jalan bagi masuknya investasi swasta.

## D. Prospek Pembangunan Tahun 2015

Prospek pertumbuhan daerah di tahun 2015 akan ditentukan oleh seberapa besar realisasi investasi di daerah. Posisi geografis Bali yang strategis merupakan modal pembangunan di Bali. Bali merupakan daya tarik wisata utama di Indonesia sehingga pengembangan industri pariwisata di Bali perlu diperhatikan dengan meningkatkan investasi swasta di bidang ini. Dukungan infrastruktur terutama bandara dan pelabuhan, serta jadwal penerbangan yang rutin dari dan menuju negara-negara utama tempat asal wisatawan asing merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pariwisata di Bali.

Bali juga memiliki beberapa komoditas unggulan selain pariwisata, terutama bahan pangan seperti padi, sapi, babi dan perikanan. Komoditas ini bukan hanya untuk memenuhi konsumsi di dalam provinsi Bali namun juga dapat diekspor ke daerah lain. Dengan keunggulan tersebut, Provinsi Bali dapat mengembangkan komoditas tersebut sebagai ikon dan penggerak perekonomian daerah yang didukung dengan industri pengolahan yang baik untuk memberikan nilai tambah.

Berdasarkan pada kinerja pembangunan selama ini serta modal pembangunan yang dimiliki dapat digambarkan prospek Bali dalam mencapai target utama RPJMN 2015-2019 sebagai berikut

1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Bali dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 7,5 – 8,6 persen dapat tercapai dengan pengembangan pariwisata yang mendukung aktivitas turunan lainnya untuk meningkatkan perekonomian. Pada tahun 2015 kunjungan wisatawan akan terus meningkat seiring dibukanya beberapa rute penerbangan langsung internasional. Pembangunan infrastruktur di Bali turut mendorong pertumbuhan investasi di Bali, antara lain pengembangan Bandara Ngurah Rai, pembangunan PLTP bedugul (100MW), penambahan Dermaga Gilimanuk, serta perbaikan jalan di Bali.
2. Upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Bali terus dilakukan agar sesuai dengan Buku III RPJMN 2015-2019. Sasaran pengurangan tingkat kemiskinan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 adalah 4,0 – 2,9 persen, sedangkan pada tahun 2013 tingkat kemiskinan di Provinsi Bali sebesar 3,95 persen. Selama kurun waktu 2014-2019 Provinsi Bali harus menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 1,05 poin persentase atau 0,18 poin persentase per tahun
3. Prospek pencapaian sasaran-sasaran utama tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan, baik internal daerah Bali maupun eksternal. Dampak pelambatan arus perdagangan global merupakan ancaman eksternal yang bisa mengganggu kinerja perekonomian daerah, di antaranya melalui arus wisatawan yang datang berkunjung ke Bali.

## E. Penutup

### 1. Isu Strategis Daerah

Dari hasil analisis di atas dapat dirumuskan beberapa isu strategis pembangunan daerah yang disaring berdasarkan kriteria: (i) berdampak besar bagi pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional; (ii) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berantai pada sasaran-sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki. Isu-isu strategis tersebut meliputi:

- a. Peningkatan produktivitas sektor pertanian;
- b. Industrialisasi dan pengembangan lapangan kerja berkualitas;
- c. Peningkatan investasi di daerah;
- d. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan;
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- f. Mobilisasi tabungan masyarakat dan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan usaha;
- g. Peningkatan kualitas belanja modal pemerintah daerah.

### 2. Rekomendasi Kebijakan

Penanganan isu-isu strategis daerah diperkirakan akan dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang perlu ditempuh dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;
- b. Pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses faktor produksi (pupuk, benih, pestisida, bibit unggul) termasuk peningkatan jaringan irigasi, penyuluhan dan promosi *brand/citra* komoditas unggulan daerah;
- c. Pengembangan sektor jasa rekreasi dan hiburan
- d. Peningkatan kemudahan perijinan usaha;
- e. Peningkatan akses pendidikan khususnya pendidikan menengah (umum dan kejuruan);
- f. Peningkatan porsi belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah;
- g. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah.

